

KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM *GOVERNMENT TO BUSINESS RELATIONS (G2B)* DENGAN CARGILL

Diah Sulung Syafitri

20120510352

Email: diahsulungsyafitri@gmail.com

Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The study of international relations that has been changing from security issue to politic-economic issue creates few new actors, notably Multinational Corporations (MNC), and enhances transnational relations called Government To Business Relations (G2B). The existence of those multinational corporations foster the politic-economic policies aims to invite foreign investment which is needed by the developing countries, such as Indonesia. The lack of technology skill makes Indonesia's natural resources only emerges in the head sector.

It is general knowledge that the plantation sector of Indonesia experience that way. Indonesia is the third biggest producer of cocoa beans in the world, but its quality does not have good packaging to sell to international market since it is not being processed.

Under decentralization policy, the government of Gresik Regency actively invites foreign investment to join development agendas in Gresik. It is proven that Cargill has chosen Gresik as the location of the building of the biggest cocoa-processing firm in Southeast Asia, eventhough Gresik is not the producer of cacao beans in Indonesia.

This thesis will research about the interest of the government of Gresik Regency towards *Government to Business Relations (G2B)* with Cargill.

Keywords: Government of Gresik Regency, G2B, foreign investment

A. PENDAHULUAN

Pergeseran lanskap studi hubungan internasional mendapat respon yang kompleks dari banyak ilmuwan. Isu ekonomi politik internasional menggantikan isu keamanan internasional. Interaksi antar negara kini pun semakin dinamis, dengan hadirnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, yang tidak lagi didominasi oleh negara (Nye & Keohane, 2003). Thomas L. Friedman menggambarkan situasi dunia saat ini sebagai “*the flattened world*” (Friedman, 2005). Masyarakat internasional kini saling berbaur satu sama lain menembus batas-batas teritorial negara, terkadang tanpa sepengetahuan negara, seolah-olah mereka tengah hidup di bumi yang datar. Tidak lagi bulat. Jangankan mengisolasi diri, bahkan melakukan aktivitas tanpa sepengetahuan pihak lain saja rasanya sudah semakin sulit. Konstelasi global yang demikian akan mendorong seseorang untuk saling membuka diri. Menjalinkan relasi satu sama lain dalam rangka mencapai kepentingan masing-masing.

Lebih jauh, ilmuwan sekelas Robert O. Keohane bahkan sudah enggan memakai istilah “hubungan internasional”, lantaran menurutnya, dewasa ini hubungan transnasional (pintas bangsa) dan *transgovernmental* (pintas pemerintahan) lebih penting. Istilah “politik dunia” lebih pantas digunakan untuk menunjuk pada suatu fenomena yang jauh lebih luas daripada “hubungan internasional” yang didefinisikan sebagai hubungan antarnegara (Nugroho & Rais, 2012).

Pada konteks ini lah, pemerintah daerah dan perusahaan multinasional masuk sebagai aktor-aktor baru dalam interaksi transnasional tersebut. Pemerintah daerah memperoleh kesempatan untuk melakukan interaksi langsung tanpa perlu perantara (dalam hal ini negara). Pola interaksi yang dibangun menembus batasan *government to government* seiring dengan pertumbuhan perusahaan multinasional yang begitu cepat. Tahun 1998, terdapat sekitar 63.000 perusahaan multinasional di dunia dengan 690.000 anak perusahaan di berbagai belahan dunia (Cohn, 2003). *Government-business relations* menjadi daya tarik tersendiri bagi pemda guna meningkatkan daya saing dan perluasan investasi daerahnya.

Government-business relations (G2B) merupakan sebuah istilah baru dalam hubungan internasional guna menggambarkan periode transisi *high politics* menuju *low politics*. Pemerintah saling berkomunikasi dan berhubungan dengan para pelaku bisnis yang membutuhkan keefisienan dalam menanamkan modal di daerahnya. Hal ini pula lah yang memicu bertumbuhnya investasi-investasi asing di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“...how institutional change has created bureaucratic barriers to entry, but also windows of opportunity for foreign direct investment (FDI.” (Meyer & Jensen, 2005)

Government-business relations menciptakan reaksi berupa kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional, apakah untuk membatasi investasi dan perdagangan atau justru untuk meningkatkan investasi dan perdagangan. Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi memilih meningkatkan hubungan dengan pihak asing untuk menggenjot investasi dan perdagangan, seperti misalnya melalui paket-paket kebijakan ekonomi, khususnya isu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan kawasan yang dirancang sedemikian rupa dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategi tertentu sehingga mampu menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan daya saing internasional.¹ Pemerintah terlihat begitu berupaya mendekati diri dengan pelaku-pelaku bisnis asing untuk menarik investasi sebesar-besarnya.

Pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah dalam melancarkan misi tersebut. Sesuai amanat desentralisasi, pemerintah daerah pun diberi wewenang khusus untuk menjalin hubungan dengan pihak pelaku bisnis tersebut. Namun, keterlibatannya tetap dibawah kendali penuh pemerintah pusat agar pencapaian strategik dari hasil interaksi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investor asing. Iklim investasi tersebut bisa meliputi kebijakan fiskal (pajak) dan moneter (tingkat suku bunga) yang menarik bagi para investor asing, tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai (jalan tol, fasilitas pelabuhan, akses internet, dan sebagainya), jaminan hukum dan keamanan, pengurangan pajak insentif terhadap perusahaan multinasional, pemberlakuan tax holiday, hingga penyediaan fasilitas produksi secara gratis. (Hermawan, 2007).

Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investor asing. Iklim investasi tersebut bisa meliputi kebijakan fiskal (pajak) dan moneter (tingkat suku bunga) yang menarik bagi para investor asing, tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai (jalan tol, fasilitas pelabuhan, akses internet, dan sebagainya), jaminan hukum dan keamanan,

¹ <http://kek.ekon.go.id/>

pengurangan pajak insentif terhadap perusahaan multinasional, pemberlakuan tax holiday, hingga penyediaan fasilitas produksi secara gratis. (Hermawan, 2007).

Pemerintah kabupaten Gresik termasuk aktor sub-negara yang aktif menjalin hubungan dengan pihak asing, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional, dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Kabupaten Gresik merupakan target wilayah investasi favorit di provinsi Jawa Timur sejak 2 tahun lalu. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik tahun 2014, 16-18% investasi di Jawa Timur berada di Gresik, dengan total nilai PMA mencapai 163,3 juta dollar (Nurhantanto, 2014). Berkaitan dengan hubungan luar negeri, utamanya investasi asing, pemerintah Gresik memang dikenal ramah terhadap para investor. Hal ini terlihat dari komitmen penyediaan infrastruktur yang memadai, stabilitas keamanan, hingga kebijakan-kebijakan yang mengundang para investor beramai-ramai menanamkan modalnya di wilayah ini.

Momentum komoditi kakao yang menjadi primadona perdagangan Indonesia di pasar internasional ditangkap pemerintah Gresik sebagai peluang untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, kendati kabupaten Gresik bukan merupakan daerah penghasil kakao. Melalui pemerintah pusat, terdapat kebijakan yang cenderung memberi kemudahan bagi investor di sektor industri perkakaoan nasional. Diantaranya adalah pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi investasi baru maupun perluasan di bidang industri pengolahan kakao dan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh dengan persyaratan merupakan industri pioner dan rencana penanaman modal Rp 1 Triliun dan memproduksi secara komersial.

Cargill masuk sebagai aktor perusahaan multinasional dalam *government-business relations* ini. Cargill merupakan sebuah perusahaan pangan global asal Amerika Serikat yang menyuntikkan modal dalam rangka pembangunan pabrik pengolahan kakao di Indonesia, tepatnya di kabupaten Gresik. Bagi Cargill, pabrik pengolahan kakao ini sekaligus menjadi pabrik pengolahan kakao pertama mereka di Asia dan yang terbesar di Asia Pasifik.

Cargill merupakan penyedia dan penjual bahan pangan, pertanian, keuangan, dan produk-produk industri, serta layanan bagi dunia, yang berdiri tahun 1865 dan berpusat di Minnesota, Amerika Serikat. Cargill mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1974, ditandai dengan pendirian pabrik pakan di Bogor, Jawa Barat. Aktivitas-

aktivitas usaha terdiri dari nutrisi hewan, kakao, biji-bijian, dan biji penghasil minyak, kelapa sawit, dan gula.

B. ARTIKULASI G2B OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Globalisasi, sebuah proses integrasi dan interaksi yang melibatkan aktor negara, teknologi, pasar, hingga perusahaan-perusahaan multinasional (Barkema, Baum, & Mannix, 2002), merupakan fenomena ekonomi yang tengah mendominasi abad 21. Integrasi ekonomi secara besar-besaran tersebut menggantikan ekonomi tradisional (Gilpin, 1987). Dalam dunia ekonomi, wajah globalisasi diperankan secara nyata oleh aktor ekonomi global yang beroperasi secara transnasional, misalnya *Multinational Corporations (MNC)* (Thun, 2008).

Pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional menembus batas-batas kedaulatan negara hingga memaksa pemerintah turut campur dalam mengontrol keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut melalui segenap kebijakan. Bagi pemerintah setempat, *government-business relations (G2B)* menitikberatkan pada keputusan-keputusan dilematis antara aktivitas *value-added* (nilai tambah) yang tinggi atau terjebak dalam hubungan ketergantungan (*dependent*) ketika pemerintah tersebut berada di “nilai tambah” yang rendah.

Oleh karena itu, *government-business relations (G2B)* dilakukan oleh pemerintah dan entiti bisnis semacam perusahaan swasta. Hubungan pemerintah dengan aktor korporasi bisa berupa hubungan kooperatif maupun adversial berbagai kebijakan ekonomi hingga sosial yang mempengaruhi masyarakat dimana bisnis itu berada.

Bentuk *government-business relations* (G2B) seringkali berbentuk penanaman modal asing (PMA). Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) menyebutkan bahwa:

“pengertian penanaman modal dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

Pada pengertian tradisionalanya, seperti halnya merujuk pada undang-undang yang sama, penanaman modal asing merupakan (1) alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia, (2) alat-alat untuk perusahaan penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, serta (3) bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Pengertian investasi langsung salah satunya adalah dikemukakan oleh Peter H. Lindert bahwa “investasi luar negeri langsung atau investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) adalah suatu arus modal kewirausahaan, dalam bentuk pembauran keterampilan manajemen dan pemberian bantuan keuangan (Lindert, 1994).

Dalam upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, masuknya modal asing atau investasi dari luar negeri dapat memberikan keuntungan yang memungkinkan suatu negara memperluas pasar dari hasil- hasil

produknya, memberikan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dan masyarakatnya dan memungkinkan Negara tersebut mampu menggunakan teknologi dari pada sebelumnya.

Di Indonesia, kegiatan PMA dibawah kendali oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (BKPM, 2014). PMA dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu (Anoraga, 2009):

1. Investasi Portofolio

Jenis investasi ini dilakukan melalui pasar modal menggunakan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut belum tentu membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya, pada proses investasi ini pun tidak terjadi transfer teknologi atau alih keterampilan manajemen.

2. Investasi Langsung

Jenis investasi ini lebih sering disebut penanaman modal asing (PMA) dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.

Berbeda dengan investasi portofolio, PMA langsung memiliki banyak benefit bagi pemerintah setempat yang menjalin relasi, antara lain sifatnya yang berjangka panjang serta adanya jaminan transfer teknologi. Jaminan transfer teknologi akan memicu industrialisasi di negara atau daerah tersebut, sehingga produksi barang akan meningkat dan berdampak positif pada prestasi ekspor. Selain dua hal tersebut, benefit yang paling disasar oleh pemerintah

setempat adalah adanya jaminan lapangan kerja baru, sehingga permasalahan pengangguran yang seringkali mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara.

Investasi erat kaitannya dengan hubungan kerjasama antar Negara atau yang mewakili. Secara general, sebelum adanya kesepakatan kerjasama dalam prosesnya dapat ditempuh dengan berbagai cara salah satunya adalah diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah aktifitas hubungan kerjasama antar negara yang telah lahir dan berkembang seiring dengan lahirnya hukum bangsa- bangsa dan bahkan sejarah telah mencatat jauh sebelum negara- negara mengenal hubungan diplomatik modern seperti dewasa ini hukum bangsa- bangsa masa lalu pun telah mempraktekan diplomasi yakni berupa aturan- aturan yang mengatur hubungan raja- raja, kedudukan dan hak istimewa para diplomat dan utusan raja (Hendra & Tjiptoherijanto, 1993).

Merujuk 2 jenis investasi diatas, pemerintah kabupaten Gresik cenderung melakukan *government-business relations* dalam bentuk PMA langsung. Pemerintah kabupaten Gresik giat menarik investor-investor asing untuk menyuntikkan modal dalam bentuk pembangunan pabrik untuk membiayai dana pembangunan yang kian meningkat. Rentang tahun 2011 hingga 2014, terjadi peningkatan dalam hal penerbitan surat izin industri yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Gresik (BPMP, 2014). Pada tahun 2011 hanya sebanyak 19 buah. Kemudian, tahun 2012 merangkak naik mencapai 21 buah. Begitupun dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 23 buah. Pada tahun 2014, grafik terus melaju secara signifikan menuju angka 54 buah surat izin industri yang telah dikeluarkan pemerintah Gresik.

Beberapa perusahaan multinasional yang telah meramaikan kabupaten Gresik. Daesang Corporation, perusahaan asing dari Korea Selatan, adalah salah satu investor PMA langsung berupa pendirian pabrik PT. Miwon Indonesia berproduksi *Monosodium Glutamate (MSG)* dengan merk Miwon.

Pemerintah kabupaten Gresik memanfaatkan letak strategis daerah secara geografis untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya. Keterjangkauan dengan pelabuhan dan bandara menjadikan kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan investasi terfavorit dibandingkan daerah-daerah lain di provinsi Jawa Timur.

Selain itu, target pemerintah Gresik agar wilayahnya masuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di era pemerintahan Jokowi juga menjadikan wilayah ini membutuhkan dana investasi yang tinggi agar pembangunan infrastruktur bisa dipercepat sesuai kebutuhan.

Salah satu perusahaan multinasional besar asal Australia, PT. Eastern, juga telah menanamkan modal sebesar 300 Milyar rupiah untuk pembangunan pabrik tepung di kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi sekitar 150 ribu ton per tahun. Sementara, untuk bahan baku gandumnya 100% langsung didatangkan dari Australia sendiri.

Kemudahan distribusi barang karena letaknya yang berdekatan dengan pelabuhan juga menarik perhatian perusahaan multinasional asal Korea Selatan, AJU Corporation, untuk membangun pabrik tiang pancang sebesar US\$ 80 juta. Selain itu, kabupaten Gresik juga dipilih menjadi lokasi investasi AJU Corporation karena kedekatan dengan pasokan bahan baku yang disediakan oleh PT. Semen Gresik.

Satu lagi bentuk nyata penanaman modal asing langsung adalah pembangunan pabrik hilir Petrokimia oleh Wilmar Elevance Pte Ltd senilai US\$ 250,5 juta. Pembangunan pabrik ini bertujuan mendorong ekspor alat-alat pertanian yang selama ini terkendali pada keterbatasan teknologi pada sebagian masyarakat petani di Indonesia

Government-business relations yang terjalin antara pemerintah kabupaten Gresik berjalan harmonis. Melalui kebijakan-kebijakan, pemerintah lokal menyusun rencana untuk mencapai beberapa tujuan yang mempengaruhi hajat penting warga negara (Wahab, 2004). Tindakan pemerintah dapat dipahami dari *policy input*, *policy goal*, dan *policy effects* (Winarno, 2005).

Pada dasarnya, terdapat beberapa definisi mengenai *policy* (kebijakan). Setiap definisi memiliki penekanan yang berbeda-beda bergantung pada latar belakang setiap ahli. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu pedoman untuk bertindak (Wahab, 2004). Dari sisi politik, definisi kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan merupakan arah atau pola kegiatan, bukan keputusan untuk melakukan sesuatu semata (Miller & McTavish, 2014).

Dengan masuknya perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, tentunya ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten Gresik dan target tersebut akan mampu berdampak positif dalam segala aspek sosial, ekonomi, hingga politik.

C. KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM G2B DENGAN CARGILL

Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana (Kemenperin, 2007). Hal ini tidak lepas dari program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan mengoptimalkan seluruh potensi pemangku kepentingan dan sumber daya yang ada (Maharani, 2015).

Saat ini, kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan ekspor nasional, disamping kelapa sawit (*oil plam*) dan tebu (*sugar cane*), dengan sumbangan devisa mencapai US\$ 1,05 Milyar per tahun (Idham, 2015).

Kehidupan manusia yang tidak pernah terlepas dari bahan makanan yang mengandung unsur coklat, ikut mendorong peningkatan permintaan komoditi kakao di pasar global. Cokelat dihasilkan dari biji kakao yang telah mengalami seperangkat pemrosesan hingga bentuk dan aromanya seperti yang saat ini beredar di pasaran.

Melihat peluang pasar tersebut, Indonesia menjadikan komoditi kakao sebagai komoditi andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara.

Kakao juga menjadi komoditi ekspor terfavorit. Hal ini bisa dipahami dari data di lapangan bahwa kebutuhan kakao dalam negeri masih dianggap sedikit, sekitar 250 ribu ton per tahun (Kemenperin, 2007). Masyarakat Indonesia memang tidak familiar dengan konsumsi olahan coklat, berbeda dengan masyarakat Eropa dan belahan dunia lainnya. Di sisi lain, karena luasnya lahan perkebunan kakao, produksi kakao di Indonesia mencapai 445.000 ton per tahun. Selain kurangnya kesadaran dalam mengkonsumsi coklat, rendahnya kebutuhan kakao nasional tersebut juga berkaitan dengan masalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk setiap kakao yang dibeli didalam negeri. Sebaliknya, jika petani mengeksport produknya ke

luar negeri, maka tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, petani lebih suka melakukan ekspor.

Pada tahun rentang waktu tahun 2006-2010, produksi Indonesia sebanyak 456 ribu ton biji kakao (Kemenperin, 2007). Di ekspor dalam bentuk biji sebanyak 365 ribu ton dan sisanya, yakni 121 ribu ton diolah didalam negeri. Produksi coklat olahan tersebut sebanyak 96 ribu ton meliputi *cocoa butter* dan *cocoa powder*.

Pada tahun 2008, volume ekspor kakao mencapai 515.538 ton. Terdapat peningkatan dibandingkan dengan ekspor tahun sebelumnya yang hanya sebesar 503.521 ton. Kemudian, meningkat drastis di tahun 2009 dengan perolehan 535.191 ton.

Dibandingkan dengan ekspor biji kakao, volume ekspor kakao olahan Indonesia pada tahun 2009 hanya sebesar 115.170 ton yang terdiri dari produk (*cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, cocoa powder*) sebanyak 83.642 ton dan produk akhir sebanyak 31.528 ton (Industri, 2010).

Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan pada ekspor komoditi biji kakao. Kenaikan ekspor mentah berbanding terbalik dengan produk olahan yang relatif mengalami penurunan ekspor mengindikasikan bahwa pengusaha kakao lebih memilih mengekspor kakao dalam bentuk biji daripada mengolah kakao didalam negeri.

Dengan demikian, selama ini Indonesia hanya dikenal sebagai penyedia bahan baku bagi industri hilir kakao di luar negeri (Syadullah, 2012). Industri hilir justru berkembang di negara-negara yang tidak memiliki sumber bahan baku kakao.

D. KESIMPULAN

Government to business relations (G2B) merupakan konsekuensi konkrit transisi hubungan internasional yang semula berfokus pada isu keamanan ke isu hubungan

ekonomi dan perdagangan. Hal ini melahirkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, yakni perusahaan multinasional sebagai entitas bisnis dan juga pemerintah daerah sebagai penyokong pemerintah pusat melalui amanah desentralisasi.

Pemerintah kabupaten Gresik serta Cargill merupakan dua aktor utama dalam interaksi G2B yang memiliki kepentingan yang saling berkelindan. Menurut teori Modernisasi yang dikemukakan Rostow, kehadiran Cargill beserta segala modal yang ditanamkan di kabupaten Gresik, memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini karena pembangunan pabrik olahan kakao terbesar se-Asia Tenggara tersebut banyak menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja akan mampu memenuhi pendapatan keluarganya, dan secara perlahan mengontrol tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.